

Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten

JRAK
4,2

615

Rakhmini Juwita

Fakultas Ekonomi - Universitas Terbuka
rakhmini@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Accountability is one of the principle of good governance, thus it can be assumed that good accountability can improve good governance. The important things to create public accountability, especially in government agencies, are with budget planning and internal control. Budget planning includes the general policy formulation of Regional Development Budget (APBD) until the arrangement of APBD with the purpose of using government funds can be on the right target, thus that funds are used effectively and efficiently. Budget planning and internal control are the most strategic activity in state finances management because it relates with public accountability. This research aims to know the effect of budget planning and internal control toward public accountability in regional government of Banten province. This research used descriptive explanatory method by using non probability sampling method at 6 (six) Regional Work Unit (SKPD) in regional government of Banten province. Data analysis which used was multiple linear regression. The result of this research shows that budget planning and internal control have the positive and significant effect toward public accountability in regional government of Banten province. It means that better budget planning and internal control can improve public accountability to be better too.

Kata kunci: *Perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas publik (Abstrak tidak dalam bahasa inggris)*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik di Indonesia masih sangat lemah karena masih banyak uang negara yang diambil oleh koruptor dan hal tersebut membuat akuntabilitas pemerintah masih rendah. Sama halnya dengan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten yang saat ini marak dibicarakan di berbagai media, seperti yang dinyatakan oleh Masyarakat Transparansi Anggaran bahwa 90% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Banten terlibat korupsi (news.liputan6.com, 5/09/2014). Hal terpenting dalam mewujudkan akuntabilitas publik diantaranya yaitu dengan adanya perencanaan anggaran dan pengendalian intern. Perencanaan anggaran mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD dengan tujuan penggunaan dana pemerintah dapat tepat sasaran dan tujuan sehingga dana digunakan secara efektif dan efisien.

Adanya pengendalian intern di pemerintah diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam organisasi khususnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengendalian Intern di pemerintah daerah masih banyak kelemahan diantaranya yaitu hasil pemeriksaan keuangan semester II Tahun 2012 oleh BPK yang menyatakan adanya 1.427 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp11,48 miliar (bpk.go.id. 2/4/2013).



Jurnal Reviu Akuntansi
dan Keuangan
ISSN: 2088-0685
Vol.4 No. 2, Oktober 2014
Pp 615-622

Perencanaan anggaran dan pengendalian intern merupakan kegiatan yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan dengan akuntabilitas kepada publik. Fenomena tersebut membuktikan bahwa masih banyak pembenahan yang harus dilakukan dalam pemerintah Daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian tentang bagaimana pengaruh penyusunan anggaran dan pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Publik baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance* sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan *good governance*. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009:20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan akuntabilitas publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui oleh para legislator (Bastian, 2010:192). Sehingga jelas bahwa perencanaan anggaran organisasi/pemerintah yang baik akan meningkatkan akuntabilitas organisasi/pemerintah.

H₁: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

H₂: Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

METODE

Objek, Desain dan Metode Penelitian

Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu Perencanaan Anggaran, pengendalian intern dan Akuntabilitas Publik. Perencanaan Anggaran dan Pengendalian intern merupakan variabel independen sedangkan Akuntabilitas Publik merupakan variabel dependen. Definisi masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel Independen (X)
 - a. Perencanaan Anggaran (X_1). Untuk mengukur variabel perencanaan anggaran, maka dalam penelitian ini menggunakan aspek penyusunan rencana kerja anggaran SKPD menurut PP Nomor 58 tahun 2005.
 - b. Pengendalian Intern (X_2). Untuk mengukur variable Pengendalian Intern menggunakan teori COSO dan PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu: (a) lingkungan pengendalian, (b) Penaksiran resiko, (c) Aktifitas Pengendalian (d) Informasi dan komunikasi (e) Pemantauan
- 2) Variabel Dependen (Y)
 Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik yang diukur dengan menggunakan teori dari elwood yang terdapat dalam Renyowijoyo (2012:41) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas: (a) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, (b) Akuntabilitas Proses, (c) Akuntabilitas Program, (d) Akuntabilitas Kebijakan

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang berada di Provinsi Banten. Teknik penarikan sampling yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *nonprobability sampling*. Berdasarkan himbauan dari Sekretaris daerah provinsi Banten, sampel penelitian tidak disarankan untuk mengambil seluruh instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Banten dan hanya enam (6) instansi pemerintah yang dapat diteliti, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

NO	INSTANSI
1	Sekretariat Daerah
2	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
3	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Badan Perencana Pembangunan Daerah

Tabel 1
Instansi Pemerintah
Provinsi Banten

Sumber: Data diolah (2016)

Sumber dan Teknik pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada pimpinan dan staf di setiap bagian dalam instansi, dan setiap instansi terdiri dari lima responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*) dan desain kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung.

Instrumen penelitian telah lolos uji validitas serta model penelitian juga tidak memiliki masalah asumsi klasik. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji hipotesis.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi
Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,946	2,720		4,024	,000
1 perencanaan anggaran	,272	,078	,293	3,461	,001
pengendalian internal	,142	,046	,263	3,110	,002

a. Dependent Variable: akuntabilitas public
Sumber Data Diolah (2016)

Dari Tabel 1.7 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis dengan menggunakan software SPSS versi 20 yaitu.

$$Y = 10.946 + 0,272 X_1 + 0,142 X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik yang terlihat dari nilai koefisien regresi variabel perencanaan anggaran (X_1) diperoleh sebesar 0.272 dengan tingkat signifikan 0,001 dan koefisien regresi variabel pengendalian internal (X_2) 0.142 dengan tingkat signifikansi 0.002. Jadi dapat dijelaskan bahwa pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik berbanding lurus (berpengaruh secara positif) yang terlihat dari koefisien regresi yang diperoleh positif. Selain pengaruh dari perencanaan anggaran dan pengendalian intern ada faktor-faktor atau variabel-variabel lain juga yang mempengaruhi akuntabilitas publik (Y) yang ditandai oleh simbol epsilon (ϵ). Sehingga hubungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika variabel perencanaan anggaran meningkat dengan asumsi variabel pengendalian intern tetap, maka akuntabilitas juga akan meningkat
2. Jika variabel pengendalian intern meningkat, dengan asumsi variabel perencanaan anggaran tetap, maka akuntabilitas publik juga akan meningkat.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} $3.110 > 1.98027$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran (X_1) maka akan semakin baik pula akuntabilitas publik (Y).

Tabel 3
Koefesien korelasi
dan determinasi
pengaruh X_1
Terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,425 ^a	,181	,198	2,004

a. Predictors: (Constant), perencanaan anggaran
Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1.8, nilai koefisien korelasi sebesar 0.425, menurut kategori Guilford hubungan perencanaan anggaran dan akuntabilitas publik dinilai sedang, pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 18.1%. Masih ada 81.9% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X_1 yang tidak diteliti.

Perencanaan anggaran merupakan digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*), dengan jalan memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*). Perencanaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran publik, anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui oleh para legislator (Bastian, 2010:192).

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{table} ($3.461 > 1.98027$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian intern (X_2) maka akan semakin baik pula akuntabilitas public (Y).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,418 ^a	,175	,180	2,022

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal
Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 4
Koefisien korelasi dan determinasi Pengaruh X_2 Terhadap Y

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1.9, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0.418, menurut kategori Guilford hubungan perencanaan anggaran dan akuntabilitas publik dinilai sedang, pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 17.5%. Masih ada 82.5% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X_1 yang tidak diteliti.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh se-

cara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($12.308 > 3.07$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran dan pengendalian intern (X_2) maka akan semakin baik pula akuntabilitas publik (Y).

Tabel 5
Koefisien korelasi
dan determinasi
Pengaruh X_1 dan X_2
Terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,465 ^a	,216	,221	2.93570

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal, perencanaan anggaran
b. Dependent Variable: akuntabilitas publik

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 1.10, nilai koefisien korelasi diatas sebesar 0.465 menurut kategory Guilford hubungan perencanaan anggaran dan akuntabilitas publik dinilai sedang, pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 21.6%. Masih ada 78.4% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X_1 yang tidak diteliti.

Perencanaan anggaran dan pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik, hal ini menandakan ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian yang lebih baik secara bersamaan mampu mendorong pelaksanaan akuntabilitas secara baik. Pengaruh positif dari perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap implementasi akuntabilitas publik, menunjukkan bahwa baiknya perencanaan anggaran dan pengendalian intern merupakan determinan akuntabilitas publik. Pelaksanaan pengendalian internal sebagai pemantau dan penilai dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan salah satu cara mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sebagai tujuan utama dalam meningkatkan *new public management* di pemerintahan dinilai kategori baik, hal tersebut menandakan bahwa akuntabilitas publik di Provinsi Banten belum maksimal dilakukan. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini terdapat empat pengukuran akuntabilitas public yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas Program dan Akuntabilitas kebijakan yang dijadikan sebagai dimensi akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik pada Provinsi Banten secara strategik dapat dicapai melalui perencanaan anggaran dan pengendalian intern yang baik. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah menetapkan akuntabilitas publik sebagai sasaran penting dalam perencanaan anggaran dan pengendalian intern di Provinsi Banten.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik di Provinsi Banten maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Perencanaan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di Provinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 18.1%, sisanya 81.9% dipengaruhi oleh faktor lain selain perencanaan anggaran
2. Pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di Provinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik

yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 17.5%, sisanya 75.5% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengendalian intern

3. Perencanaan anggaran dan pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di Provinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas public sebesar 21.6%, sisanya 78.4% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengendalian intern

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dan tertarik dengan judul ini ataupun ada variabel yang mungkin sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan variabel perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitaas publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai pedoman peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas publik

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik –Ed IV*. ANDI. Yogyakarta.
- Renyowijoyo, M. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Sektor Non Laba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- www.bpk.go.id/web/?p=14447, 2/04/2013. Diunduh [30/4/2013]
- www.news.liputan6.com/read/2062309/90-pejabat-banten-diduga-tersangkut-kasus-korupsi, Diunduh 5/09/2014

